

**MODEL *ROOT CAUSE ANALYSIS* SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri)**

Dian Praharaningtyas, Fatchan Achyani, Triyono

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud transparansi pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi kepada publik. Bagaimana penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri menjadi fokus tujuan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan model *Root Cause Analysis* “5 *Why Analysis*” yaitu bertanya mengapa sebanyak lima kali atau berulang kali sampai menemukan akar masalahnya. Teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melakukan wawancara kepada pegawai yang menjadi operator SIPD dengan membuat daftar pertanyaan dalam observasi dan dokumentasi. Hasil kesimpulan yang penulis dapat bahwa tidak semua informan mempunyai akar masalah yang sama dalam penerapan SIPD. Beberapa akar masalah lain yang menyebabkan kurang maksimal ada 3 faktor utama yaitu kendala komunikasi, kendala aplikasi serta kendala sumber daya manusia.

Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*), 5 *Why Analysis*.

Abstract

Use of the Regional Government Information System (SIPD) as a form of regional government transparency in disclosing information to the public. How SIPD is implemented in regional financial management at the Wonogiri Regency Manpower Service is the focus of this research. The author uses qualitative research with the Root Cause Analysis model "5 Why Analysis", namely asking why five times or repeatedly until finding the root of the problem. The main technique used in data collection is conducting interviews with staff who are SIPD operators by making a list of questions for observation and documentation. The author's conclusion is that not all informants have the same root problems in implementing SIPD. There are 3 main factors that cause less than maximum problems, namely communication constraints, application constraints and human resource constraints.

Keywords: Regional Government Information Systems, Regional Financial Management, Root Cause Analysis, 5 Why Analysis.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia mengharuskan penerapan akuntansi akrual penuh dan Penerapan SIPD secara efektif adalah tujuan utama dalam mempermudah serta

mempercepat suatu kegiatan pengawasan maupun evaluasi terhadap pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri khususnya pada Dinas Tenaga Kerja. Namun, observasi awal yang didapat dari lokasi penelitian menunjukkan ada beberapa kendala yang dihadapi dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam penginputan kegiatan. Berdasarkan observasi awal inilah, pengelola SIPD menyatakan jika sebenarnya penerapan ini sudah efektif namun banyak kendala yang didapatkan dari sistem yang berbasis web ini. Fenomena yang muncul pada penerapan SIPD adalah masalah penggajian serta penyusunan seluruh tata kelola keuangan, baik RKPD maupun APBD. Memasuki tahun 2021 banyak terjadi masalah pada SIPD dalam proses penyusunan APBD. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan daerah dalam menggunakan sistem ini. Akibatnya, daerah dilematis dan bingung, sehingga pembayaran gaji terlambat dan eksekusi pada beberapa proyek serta kegiatan-kegiatan juga mengalami kendala dan terhambat.

Berbagai penelitian telah membahas mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di berbagai OPD di Indonesia, namun belum ada yang meneliti dengan menggunakan model root causes analysis penerapan SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya novelty ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah mengapa dalam penerapan SIPD kurang maksimal hingga kemudian menemukan solusi untuk menangani masalah tersebut.

2. METODE

Penerapan SIPD secara efektif adalah tujuan utama dalam mempermudah serta mempercepat suatu kegiatan pengawasan maupun evaluasi terhadap pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri. Namun, observasi awal yang didapat dari lokasi penelitian menunjukkan ada beberapa kendala yang dihadapi dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi

penghambatan dalam penginputan kegiatan. Berdasarkan observasi awal inilah, pengelola SIPD menyatakan jika sebenarnya penerapan ini sudah efektif namun banyak kendala yang didapatkan dari sistem yang berbasis web ini. Berdasarkan penjelasan data di atas, maka peneliti tertarik meneliti penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Wonogiri.

Root Cause Analysis merupakan suatu metode untuk membantu menjawab pertanyaan ‘apa yang terjadi?’, ‘bagaimana bisa terjadi?’, dan ‘mengapa itu terjadi?’. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengidentifikasi faktor yang dinyatakan dalam bentuk alami, besaran, lokasi dan waktu akibat dari kebiasaan, tindakan dan kondisi tertentu yang harus diubah untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu. Root cause analysis memberikan jalan keluar yang lebih baik, tidak sekedar "faktor A menyebabkan kejadian B", namun "Dengan mengubah faktor A, maka kemungkinan kejadian B dapat dikurangi atau bahkan dicegah." Mempelajari *root cause analysis* secara tepat merupakan kajian yang penting untuk diperkenalkan kepada para pemangku kebijakan agar dalam proses membuat kebijakan didasari atas solusi mengatasi permasalahan pokok.

Menurut Max Ammerman (1998) dalam bukunya yang berjudul *Root Cause Analysis* terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan analisis akar masalah ada lima langkah dalam tahapan RCA, antara lain mengidentifikasi masalah, menjelaskan apa yang terjadi, mengidentifikasi faktor penyebab, mengidentifikasi akar penyebab, merancang dan menentukan rencana perbaikan, mengukur hasil evaluasi perbaikan.

Alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan RCA yaitu Analisis Pareto, “5 Mengapa” atau 5 *Why*, *Brainstorming*, Diagram Alir (Pemetaan Proses), *Cause and Effect* Diagram, Diagram pohon, Bench-marking tentu setelah *Root Cause* ditemukan. Teknik yang paling sering digunakan adalah *The 5 Whys* dan *Fishbone* Diagram. *The 5 Whys* adalah teknik yang dikembangkan oleh Sakichi Toyoda untuk analisis akar masalah di pabrik Toyota. *Tools* ini menangani masalah dengan mengembangkan pertanyaan ‘mengapa’. Pertanyaan mengapa diajukan untuk mengetahui penyebab sebuah masalah. Setelah mengetahui

penyebab, “mengapa” digunakan lagi untuk mengetahui penyebab dari penyebab tersebut dan seterusnya.

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode *root cause analysis* berupa alat analisis “5 why analysis” dan *fishbone* diagram untuk menemukan akar masalah dalam penerapan SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi dan Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri, dengan beberapa pertanyaan utama dan beberapa pertanyaan spontan untuk mendapat informasi dari informan mengenai penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan.

Peneliti mewawancarai informan setelah itu mencatat hasil yang didapat dari informan untuk diketik kembali. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dilakukan peneliti selama 6 bulan. Dalam penjabaran hasil dari wawancara peneliti, peneliti menyebutkan identitas informan sebagai keakuratan data informan yang sesuai dengan pembahasan topik pada penelitian kali ini.

Analisis akar masalah penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah studi empiris di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri seperti yang dibahas pada bab 2 adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi masalah

Penelitian ini membahas mengenai penerapan SIPD, karena didalam pelaksanaannya ternyata ada berbagai masalah yang ditemukan antara lain kurang maksimalnya penerapan SIPD sehingga mengakibatkan tertundanya sejumlah kegiatan. Selain itu dijumpai banyak program lokal yang menunya tidak ditemui dalam SIPD dan akibatnya seringkali terjadi penundaan pencairan anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aris Budi Setiarso, SE bahwa SIPD mempunyai menu yang terlalu banyak sehingga membuat bingung saat penginputan. Oleh karena itu, peneliti mengambil prioritas masalah utama adalah penerapan SIPD yang kurang maksimal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Wonogiri.

b. Menjelaskan apa yang terjadi

Setelah masalah ditemukan, selanjutnya dilakukan prioritas masalah yaitu penerapan SIPD yang kurang maksimal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Menurut bapak Daniel Hari Budiman, SE daerah masih dalam penyesuaian dengan sistem yang baru dan belum tersinkronisasi dengan sistem keuangan daerah. Peneliti selanjutnya mencari informasi dan fakta terkait penerapan SIPD untuk memahami permasalahan yang sebenarnya. Peneliti nantinya akan melakukan wawancara kepada para informan yang bersangkutan dengan SIPD.

c. Mengidentifikasi faktor penyebab

Sebelum mengidentifikasi akar masalah dari penerapan SIPD yang kurang maksimal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri. Peneliti harus menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan SIPD kurang maksimal. Menurut Bapak Agung Purnomo, SH ada kesulitan dalam penginputan, server dari pusat yang tidak stabil serta jaringan internet petugas. Peneliti melihat jaringan internet menjadi salah satu masalah yang selama ini menjadi kendala yang menyebabkan penerapan SIPD kurang maksimal.

d. Mengidentifikasi akar penyebab

Penelitian ini menggunakan *5 why analysis* untuk menggali lebih dalam sampai pada akar permasalahan yang sebenarnya, akar penyebab bisa diketahui dengan cara bertanya “mengapa” sebanyak 5 kali atau secara berulang kali hingga sampai pada satu titik dimana jawaban pertanyaan telah menunjukkan suatu akar masalah (Ohno, 1988).

Dalam melakukan analisis akar masalah, peneliti melakukan wawancara kepada 4 pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas sebagai operator SIPD. Adapun hasil dari wawancara adalah sebagai berikut:

- 5 Why Analysis

1) Aris Budi Setiarso, SE

Mengapa penerapan SIPD belum optimal?	
Why 1	Kurang optimal karena ada kendala dalam penginputan
Why 2	Karena petugas kesulitan menginput
Why 3	Karena petugas kurang menguasai
Why 4	Karena aplikasi yg kurang sederhana, terlalu banyak menu di dalamnya
Why 5	
Root cause	Karena aplikasi yg kurang sederhana, terlalu banyak menu di dalamnya

2) Agung Purnomo, SH

Mengapa penerapan SIPD belum optimal?	
Why 1	Karena ada kesulitan dalam penginputan, server dari pusat serta jaringan internet petugas
Why 2	Karena semua saling berhubungan dalam penginputan jika server aplikasi dan jaringan petugas tidak mendukung untuk masuk dalam aplikasi membutuhkan waktu yang lama serta dengan menu aplikasi yang terlalu banyak
Why 3	Untuk server aplikasi karena mungkin bandwidth yang tidak cukup untuk mencakup seluruh petugas di Indonesia yang menyebabkan overload sedangkan jaringan internet ini karena kendala provider yang tidak stabil. <i>Bandwith</i> yang kurang menyebabkan aplikasi sulit untuk diakses atau lambat didukung dengan jaringan internet yang tidak cepat semakin membuat aplikasi sulit di akses
Why 4	Karena kalau <i>bandwith</i> tergantung kapasitasnya mbak dan itu gak tau pusat dalam penganggarannya bagaimana beli servernya yang bagaimana juga kurang tau, kalau provider tidak stabil karena mungkin faktor sinyal dan alam, untuk WiFi kantor kan kadang down kadang up tergantung telkomnya juga jaringannya sedang bagus atau tidak dan itu tidak menentu ketika jaringan bagus tapi server down kan sama saja gak bisa akses SIPD
Why 5	Karena aplikasi SIPD digunakan secara serentak oleh lebih dari 540 Pemda di Indonesia sehingga

	menyebabkan aplikasi tidak stabil.
<i>Root cause</i>	Karena aplikasi SIPD digunakan secara serentak oleh lebih dari 540 Pemda di Indonesia sehingga menyebabkan aplikasi tidak stabil. Kapasitas bandwidth dan juga provider tidak stabil karena mungkin faktor sinyal dan alam, juga jaringannya sedang bagus atau tidak dan itu tidak menentu ketika jaringan bagus tapi server down tidak bisa akses SIPD

3) Tri Handayani, Sos

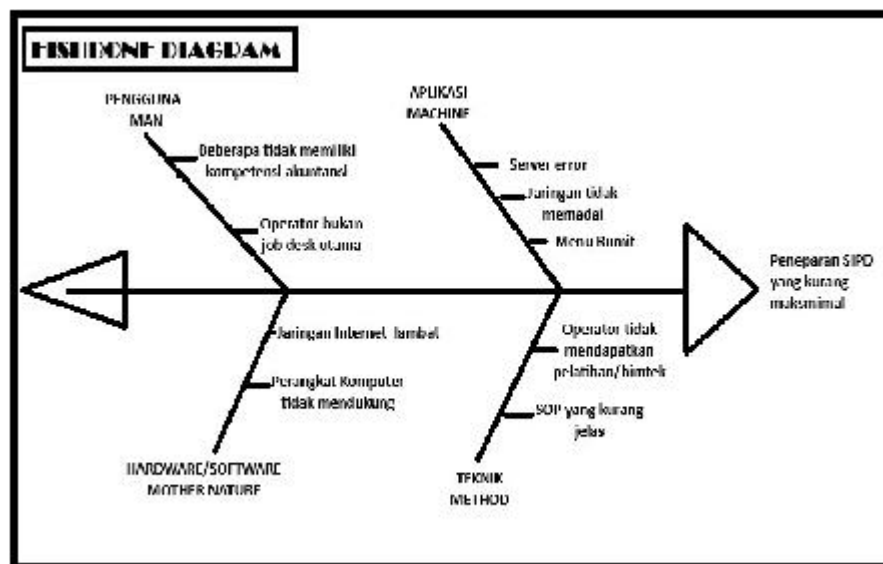
Mengapa penerapan SIPD belum optimal?	
Why 1	Karena operator SIPD mengalami kesulitan dalam memasukkan data/angka
Why 2	Karena operator SIPD masih kebingungan dengan kode rekening atau anggaran
Why 3	Karena sebagai operator SIPD di bidang-bidang belum pernah mendapatkan sosialisasi penggunaan SIPD dari BAPEDA, selama ini hanya mendapatkan bimbingan atau arahan dari bidang perencanaan di Sekretariat dan juga operator SIPD bukan orang akuntansi jadi tidak begitu menguasai atau memahami tentang anggaran sehingga terkadang salah input.
Why 4	Karena kami mempunyai job desk utama selain menjadi operator SIPD alias rangkap jabatan
Why 5	Karena terbatasnya pegawai yang ada.
<i>Root cause</i>	Karena terbatasnya jumlah pegawai yang ada sehingga yang ditunjuk sebagai operator SIPD hanya pegawai yang masih muda di bidang-bidang. Operator SIPD belum pernah mendapatkan sosialisasi penggunaan SIPD dari BAPEDA, selama ini hanya mendapatkan bimbingan atau arahan dari bidang perencanaan di Sekretariat dan juga operator SIPD bukan orang akuntansi jadi tidak begitu menguasai atau memahami tentang anggaran.

4) Daniel Hari Budiman, SE

Mengapa penerapan SIPD belum optimal?	
Why 1	Karena masih dalam penyesuaian dengan sistem yang baru dan belum tersinkronisasi dengan sistem keuangan daerah, terlebih adanya perubahan indikator Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Kepmen 050-5889 tentang Kodifikasi Nomenklatur untuk Sub

	Kegiatan
Why 2	Karena perlu penyesuaian karena belum sepenuhnya data-data dari Kabupaten/Kota yang ditarik dari SIPD yang dikelola daerah dengan SIPD telah masuk semuanya atau dapat dikatakan belum sepenuhnya terintegrasi
Why 3	Karena pada Sub Kegiatan terdapat perubahan indikator yang disesuaikan dengan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Why 4	
Why 5	
Root cause	Karena pada Sub Kegiatan terdapat perubahan indikator yang disesuaikan dengan Kepmen 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- *Fishbone Diagram*



Gambar 4.5
Fishbone Diagram

Hasil analisis *fishbone* di atas mengenai penerapan SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kab. Wonogiri belum optimal didapatkan 4 faktor penyebab. Faktor

pertama adalah komunikasi pada teknik metode dimana operator tidak mendapatkan pelatihan/bimtek dan SOP yang kurang jelas sehingga operator mengalami kebingungan dan salah input dalam memasukkan data. Faktor kedua adalah aplikasi pada machine, server SIPD sering sekali mengalami *error*, jaringan yang tidak memadai. Selain kendala dalam server dan jaringan, menu di dalam aplikasi yang sangat banyak dan rumit. Faktor ketiga adalah pengguna atau Sumber Daya Manusia, beberapa operator SIPD tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi, dan juga tugas sebagai operator ternyata bukan *job desk* utama mereka. Yang terakhir faktor keempat yaitu pada hardware/software yang ada di Dinas Tenaga Kerja antara lain jaringan internet yang lambat dan perangkat komputer yang dimiliki tidak mendukung atau bisa dikatakan tidak *up to date*.

e. Merancang dan menentukan rencana perbaikan

Setelah mengetahui akar masalah dari belum optimalnya penerapan SIPD, selanjutnya peneliti melakukan analisis mengenai tindakan perbaikan yang efektif untuk mengatasi kendala dalam penerapan SIPD agar bisa optimal sehingga pengelolaan keuangan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri berjalan lancar. Adapun tindakan perbaikan menurut peneliti ialah sebagai berikut :

1) Pemerintah Pusat

- a) Perlu diupayakan terselenggaranya bimbingan teknis kepada OPD dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Wonogiri karena pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal.
- b) Membuat *feeder* (Aplikasi manajemen data) SIPD. *Feeder* SIPD ini bisa mengolah data mulai dari menginput RKA, proses penganggaran hingga tahap pelaporan. Bisa dikatakan, *feeder* ini sangat membantu operator dan pejabat yang berkepentingan serta membantu OPD untuk bisa mendata dan melaporkan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah dengan lebih mudah. Selain itu, *feeder* SIPD ini tidak bercampur dengan data pusat SIPD. Namun, tetap tersinkronisasi dengan data pusat SIPD. Sehingga operator bisa memasukkan data setiap saat, tidak seperti sekarang ini penginputan data dilakukan dengan *web entry*. Nantinya semua instansi

pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia wajib menggunakan aplikasi *feeder* tersebut untuk sinkronisasi data dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- c) Menu aplikasi yang rumit dibuat sederhana agar pengguna tidak mengalami kesulitan.
- 2) Pemerintah Daerah
- a) Melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lulusan sarjana atau magister akuntansi.
 - b) Mengadakan bimbingan teknis penerapan SIPD kepada semua operator SIPD di OPD bukan hanya pegawai di bidang perencanaan.
 - c) Memperkuat jaringan internet di OPD yang ada di kabupaten Wonogiri agar error yang terjadi saat input data berkurang.
- 3) Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja)
- a) Dinas Tenaga Kerja mengusulkan kebutuhan ASN baru ke pemda/pusat sesuai dengan kebutuhan yaitu sarjana atau magister akuntansi yang memiliki kompetensi akuntansi.
 - b) Dinas Tenaga Kerja sebagai pengguna mempersiapkan semua data yang dibutuhkan seperti data Renstra dan Renja supaya lebih cepat dalam proses input data.
 - c) Pengguna dapat menginstal atau mengupdate aplikasi virus versi terbaru dan merefresh aplikasi, serta menambah kapasitas jaringan internet.
 - d) Bidang perencanaan mengadakan pelatihan khusus secara internal ke operator SIPD bidang untuk meminimalisir kebingungan petugas dalam proses penginputan untuk mencegah terjadinya kesalahan memasukkan data akibat banyaknya menu yang ada di SIPD.
- f. Mengukur hasil evaluasi perbaikan.

Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran hasil evaluasi perbaikan, melainkan hanya pada mencari akar masalah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri) dan memberikan saran

perbaikan. Dalam pengukuran evaluasi perbaikan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan waktu dimiliki oleh peneliti hanya sebentar.

3.2 Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 4 pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang menjadi operator SIPD pada bidang masing-masing, terdapat beberapa akar masalah dari implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri). Adapun akar masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Akar masalah kurang maksimal penerapan SIPD, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dela Alfani (2022) yang menyatakan bahwa di instansi dalam prosesnya masih tidak memahami penggunaan SIPD secara menyeluruh. Hal ini diakibatkan pemerintah hanya sekedar melakukan sosialisasi tapi tidak dengan melakukan pelatihan khusus kepada setiap instansi. Sehingga saat penginputan dilakukan, pegawai yang terkait dalam proses SIPD ini masih butuh bantuan pihak lain.

b. Aplikasi

Akar masalah kurang maksimal penerapan SIPD sesuai dengan teori oleh Tumija (2023) ada beberapa hambatan dalam penerapan SIPD a) pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal; b) Server yang tersedia kurang kuat; dan c) teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehingga laporannya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Aplikasi SIPD yang dirasa cukup rumit, mempunyai banyak menu yang membingungkan, alangkah lebih baik bila menu yang ada di SIPD lebih disederhanakan agar mudah dipahami oleh operator SIPD. Selain menu yang terlalu rumit, *website* SIPD yang sulit diakses juga server dari pusat karena aplikasi SIPD digunakan secara serentak oleh lebih dari 540 Pemda di Indonesia sehingga menyebabkan aplikasi tidak stabil serta jaringan internet operator SIPD yang sering mengalami *error*.

c. Sumber daya manusia

Akar masalah ketiga sesuai dengan teori oleh Nadya Balqis (2022) masih terjadi kendala di dimensi komunikasi, sumber daya, dan disposisi. secara signifikan, dan juga terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD. Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merasa belum siap akan penggunaan aplikasi yang berbasis web ini. Oleh sebab itu, peneliti menduga permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian terkait dengan kurangnya pemahaman pengetahuan SDM dalam mengelola aplikasi SIPD.

3.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Sistem informasi pemerintahan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi yang memuat informasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat.

Tetapi, dibalik harapan besar tentang sistem ini seperti yang dikemukakan diatas, pada kenyataannya belum ada sistem yang sempurna, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan pada sistem informasi pemerintahan daerah ini seperti temuan penelitian antara lain kendala komunikasi dimana pemerintah pusat maupun daerah kurang memberikan sosialisasi dan juga pelatihan khusus kepada operator SIPD.

Kendala kedua adalah aplikasi yang rumit, jaringan internet yang kurang memadai sehingga sering terjadi *error*, Solusi untuk kendala tersebut pemerintah pusat menyederhanakan menu SIPD agar petugas mudah menginput data. Untuk kendala jaringan internet bisa diatasi dengan menambah kapasitas server sesuai dengan kebutuhan website supaya meminimalisir *error* yang terjadi.

Terakhir kendala ketiga yaitu sumber daya manusia yang kurang kompeten karena keterbatasan pegawai yang dimiliki terkadang terjadi kesalahan input data karena kekurangtahuan mereka dalam alur akuntansi sehingga banyak

pekerjaan dan proses penginputan lainnya mengalami keterlambatan yang sebenarnya sangat disayangkan.

Di kendala yang ketiga ini sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja yang menjadi operator SIPD adalah yang bukan dibidangnya karena mereka juga mempunyai job desk utama selain menjadi operator. Operator SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 4 hanya 1 yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi sedangkan yang 3 lainnya tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Permasalahan ini bisa diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Kasubag Perencanaan juga mengambil tindakan yaitu mengakomodir pegawai untuk bekerja sesuai dengan Tupoksinya. Struktur organisasi yang sesuai dan terarah mewujudkan keberhasilan implementasi SIPD di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri ternyata masih kurang optimal, terdapat beberapa kendala yang menghambat yang ditemui. Maka saran yang dapat peneli sampaikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri agar dalam penerapan SIPD dapat secara maksimal digunakan, maka membuat *feeder* SIPD untuk mengatasi masalah *error* yang sering terjadi, kemudian mengusulkan pengadaan ASN baru dari sarjana atau magister akuntansi, memberikan bimbingan khusus ke operator SIPD, menambah jaringan *bandwith* internet di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dan juga hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F., Lovita, & Putri, E. (2021). The Effect of Good Corporate Governance, Sales Growth, and Capital Intensity on Accounting Conservatism (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3), 255–267.
- Almas, A. F. (2018). Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Ilmu dan

- Pendidikan (Penerapan Metode Problem Based Learning dan Discovery Learning). *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 3(1), 89. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v3i1.1147>
- Dan, P., Daerah, B., Saputro, G. E., & Adi, S. (2022). *1 1* , 2) ,. 2(10), 3573–3588.
- Farida, I., Mulyani, S., Akbar, B., & Setyaningsih, S. (2021). Implementation and Performance of Accounting Information Systems, Internal Control and Organizational Culture in the Quality of Financial Information. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(1), 222–236. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7809941>
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat*, 8(February), 1–13.
- Ikayanti, H., & Prof. Gugus Irianto, S. M. P. D. A. C. (2017). ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS) KECURANGAN AKADEMIK PADA SAAT UJIAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Maciá Pérez, F., Berna Martínez, J. V., & Lorenzo Fonseca, I. (2021). Strategic IT alignment Projects. Towards Good Governance. *Computer Standards and Interfaces*, 76(May 2020). <https://doi.org/10.1016/j.csi.2021.103514>
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>
- Ningsih, S. (2016). The Antecedents of Non-Unqualified Opinions of Local Governments Financial Statements: A Study on Counties and Cities in East Java Province. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B003>
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- T Triyono, F Achyani, M. A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2020). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. *Government Information Quarterly*, 37(3), 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005>